

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas permasalahan yang didiskripsi ini kemudian penulis menyimpulkan:

1. Implementasi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam penyampaian informasi melalui media massa sejauh ini sudah berjalan dengan baik.
2. Implikasi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang pers terhadap penyampaian informasi melalui media massa ialah: dengan adanya pers maka hal tersebut akan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari – hari dan untuk pekerjaannya, perihal kebebasan pers secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas , bersih dan bijaksana, logikanya melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa,dan perihal peranan pers akan menumbuhkan suatu sistem demokrasi yang baik. dalam suatu pemberitaan

pers peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU pers yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHPPer atau KUHP, apabila melanggar dan menghalang-halangi pelaksanaan kemerdekaan pers sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, ketentuan pidana tertuang dalam pasal 18 ayat (1) UU PERS.

B. SARAN

1. Agar penyelenggaraan penyampaian informasi dimedia massa lebih efektif dan akurat hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ada dalam UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kesadaran akan tanggungjawab yang paling utama yang harus dimiliki oleh para jurnalistik sebagai salah satu profesi dalam penyampaian informasi.
2. Selain dari pada pihak Pers, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan kepada pers, hingga meningkatkan suatu kebebasan pers yang bertanggung jawab dan juga informasi-informasi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015.
- Darwanto dan Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Daulay Hamdan. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: Raja Rosdakarya, 2006.
- Effendy Uchjana Onong. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hefni Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Pranadamedia, 2017.
- Ispandriano S. Lukas. *Media dan Politik. Sikap Pers Terhadap Pemerintah Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

- Kertapati Ton. *Dasar-dasar Publisistik dalam Perkembangannya di Indonesia Menjadi Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Manan Bagir. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Muda Iskandar Deddy. *Jurnalistik Televisi : Menjadi Reporter Profesional*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhtadi Saeful Asep. *Jusnalistik Pendekatan Teori dan praktik*. Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mukarom Zaenal. *Komunikasi Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Morissan. *Jurnalistik Televisi Muktahir*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2008.
- Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Sadi Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Subiakto Henry dan Ida Rachman . *Komunikasi Politik, Media, dan demokrasi*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Suparyanto Yudi. *Demokrasi Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, 2007.
- Rahmanto Agung. *Kebebasan Pers*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002.
- Syaamil Quran. *Al-Qur'an dan terjemah*, Bogor: Cordova, 2007.
- Tamburaka Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2012.
- Yusup M. Pawit. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Jakarta: PT. Bumi aksara, 2009.

Jurnal, Koran, Internet:

- Udin Suchaini, “ Diskrepansi Pembangunan Desa”, Kompas 22 April 2019.
- Siti Sarah Somaya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi*

*Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan
Kebebasan Pers.*

“Demokrasi” <http://id.m.wikipedia.org>.

“Informasi” <http://id.m.wikipedia.org>.

“Kebebasan Pers” <http://id.m.wikipedia.org>.

“Landasan Hukum Pers di Indonesia” <http://guruppkn.com>.

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers.